

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis serta penelitian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara substantif eksistensi ke-4 anggota legislatif perempuan sebagai representasi masyarakat Kota Tidore Kepulauan khususnya perempuan dalam perannya dalam pelaksanaan fungsi legislasi masih kurang karena hingga hampir selesainya masa jabatan hanya ada 1 PERDA yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, masih ada aspirasi perempuan yang belum diakomodir. Untuk perannya dalam pelaksanaan fungsi anggaran sudah baik karena kedua anggota legislatif perempuan yang tergabung di Badan Anggaran dapat dikatakan berhasil dalam mengawal kepentingan perempuan sehingga terjadi peningkatan pagu anggaran untuk kegiatan pemberdayaan perempuan di tahun anggaran 2019, sebelumnya setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan terkendala sedikitnya anggaran yang dimiliki. Selanjutnya untuk pelaksanaan fungsi pengawasan juga sudah baik, erat hubungannya dengan fungsi anggaran peningkatan pagu anggaran disebabkan karena hasil dari evaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya dari komisi III yang bermitra dengan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan untuk pelaksanaan fungsi reses dari kuesioner yang dibagikan diperoleh hasil yang menunjukkan lebih dari setengah responden (57,5%)

mengakui bahwa anggota legislative perempuan sudah memanfaatkan masyarakat atau jaringan aktivis perempuan untuk mendengar aspirasi perempuan, dan 42,25% responden menyatakan bahwa anggota legislative perempuan sudah mengakomodir aspirasi dan kepentingan perempuan selama masa jabatannya. Tapi lebih dari setengah responden (63,75%) mengaku belum puas dengan kinerja anggota legislatif perempuan. Penilaian dari masyarakat ini setidaknya menjadi tolak ukur bahwa anggota legislatif perempuan sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsinya namun belum maksimal dalam mempertanggungjawabkan identitas representasi yang dimiliki

2. Banyak faktor yang menjadi pengaruh ke-empat anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi perempuan di Kota Tidore Kepulauan, salahsatunya yaitu Kapasitas Teknis yang dimiliki, termasuk didalamnya tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Namun berdasarkan hasil observasi yang paling berpengaruh yaitu Sistem politik dimana sistem presidensiil mempengaruhi tingkat independensi anggota legislatif karena adanya pembagian kekuasaan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Dan juga system pemilu dimana ssstem proporsional yang dianut melahirkan anggota legislatif yang dalam masa jabatannya konsiderasi utamanya akan lebih ke kepentingan partai politik dibanding kepentingan konstituennya.

6.2 Saran

Ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan setelah melakukan penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan, agar membentuk mekanisme evaluasi kinerja, baik untuk Anggota DPRDnya maupun Alat Kelengkapan Dewannya. Dan khususnya di Bagian Persidangan agar lebih telaten dalam mengelola arsip yang ada, utamanya arsip terkait DPRD periode yang sedang berjalan agar tidak ada dokumen yang hilang. Selain itu, perlu adanya proses dokumentasi legislasi dengan baik dan memudahkan akses publik pada proses ini.
- b. Untuk ke-empat anggota legislatif perempuan, agar lebih peka dengan isu-isu social yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, dan juga lebih memanfaatkan jaringan dengan aktivis perempuan yang mengawal kepentingan perempuan untuk lebih mengetahui aspirasi-aspirasi perempuan di Kota Tidore Kepulauan.
- c. Untuk masyarakat, khususnya perempuan Kota Tidore Kepulauan, agar lebih pandai memilih calon wakil rakyat. Sehingga kedepannya perempuan memiliki representasi yang secara substantif mampu mengawal kepentingan perempu